



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, Makassar 90231 Telp. (0411) 434 164
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email dukcapilsulsel@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 067/1857/DISDUKCAPIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Mugniwangsa, S.STP, M.Si
NIP : 19851014 200412 1 001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Sekretaris selaku Pejabat PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa dalam tahap pemilihan maupun tahap pelaksanaan hanya terdiri dari beberapa dokumen pengadaan sebagai kelengkapan administrasi pengadaan barang/jasa. Selain itu, pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung/pengadaan langsung seluruhnya dikerjakan secara Swakelola, sehingga beberapa persyaratan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa tidak seluruhnya dibuat, dikarenakan telah terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Swakelola. Adapun Dokumen dimaksud antara lain;

1. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
2. Dokumen Penawaran Administratif;
3. Surat Penawaran Penyedia;
4. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
5. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Pemenang Pemilihan;
6. Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
7. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
8. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
9. Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan (telah termuat dalam persyaratan penyedia);
10. Berita Acara penjelasan pekerjaan (telah termuat dalam spesifikasi teknis dan kontrak);
11. Berita Acara pemeriksaan hasil pelelangan (sampai dengan saat ini belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode tender);

12. Pengumuman Pemenang Tender (hingga saat ini belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode tender);
13. Berita Acara Sanggahan dan Sanggah Banding (hingga saat ini belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode tender);
14. Surat Perjanjian Kemitraan (hingga saat ini belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode tender);
15. Surat Perjanjian Swakelola;
16. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
17. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
18. Surat Jaminan Pelaksanaan (pelaksanaan tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak);
19. Surat Jaminan Uang Muka (keseluruhan proses pembayaran pada pengadaan barang dan jasa memakai metode pembayaran pada akhir pekerjaan/pekerjaan selesai);
20. Berita Acara Serah Terima Sementara atau *provisional hand over* (pengadaan barang dan jasa sepenuhnya menggunakan metode *final hand over*).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Makassar, 19 September 2023
PEJABAT PPID PELAKSANA,



A. Muqniwangsa, S.STP., M.Si
Pangkat : Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19851014 200412 1 001